

Status KEK Maloy Terancam Dicabut, Investasi Tidak Berkembang, Diberi Waktu hingga Juni 2024



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,06/2/2024

BALIKPAPAN, TRIBUN – Hingga kini, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kalimantan Timur belum mampu beroperasi dan menggaet investor sesuai target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha menyelesaikan persoalan tersebut sampai Juni 2024. Jika tidak, status Kawasan Ekonomi Khusus akan dicabut Pemerintah Pusat.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia telah berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK MBTK. “Saya minta laporan yang detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024).

Dilansir kompas.com, frasa “Berjuang di Jakarta” yang Akmal maksud adalah ia akan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah di KEK MBTK. Berdasarkan catatan yang ia terima, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 2019, KEK MBTK belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Hingga 2023, lanjut Akmal, investasi yang masuk ke kawasan ekonomi khusus ini baru Rp100 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan KEK di daerah lain, investasinya sudah mencapai triliunan rupiah.

Dari diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan di KEK MBTK, Akmal mengatakan, terdapat sejumlah kendala yang membuat kawasan ekonomi khusus di Kaltim ini stagnan. Beberapa di antaranya adalah persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya minat investor.

Dengan perkembangan yang lambat itu, pemerintah pusat berencana mencabut kawasan ekonomi khusus untuk Maloy apabila Pemprov Kaltim tidak mampu membenahi

persoalan yang ada, termasuk memenuhi sejumlah persyaratan dalam perizinan. “Batas akhir keputusan Pemerintah Pusat itu Juni tahun ini,” kata Akmal.

Akmal merinci, salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan calon investor adalah infrastruktur dasar di KEK MBTK. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan menjadi dua hal krusial yang ditanyakan.

Namun, dua hal itu belum sepenuhnya siap dan tersedia di KEK MBTK. Akmal berharap semua kekurangan persyaratan KEK MBTK bisa selesai kurang dari lima bulan. Akmal yang dilantik menjadi Penjabat Gubernur Kaltim pada Oktober 2023 itu mula-mula akan meminta laporan menyeluruh KEK MBTK dari semua pemangku kepentingan.

Setelah itu, ia akan berkomunikasi dan melaporkan berbagai kondisi dan perkembangan di KEK MBTK kepada Pemerintah Pusat, termasuk berkomunikasi kepada Presiden. “Nanti saya akan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Akmal.

Hilirisasi

KEK MBTK diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi Rp34,4 triliun dan menyerap 55.700 tenaga kerja sampai tahun 2025.

KEK MBTK seluas 509 hektare dibentuk untuk menjadi pusat hilirisasi kelapa sawit dan komoditas lain. Selain itu, kawasan itu juga ditargetkan menjadi pusat bagi industri energi, seperti industri mineral, gas, batubara, dan industri turunannya.

Wilayahnya yang terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dinilai punya potensi ekonomi. Sebab, KEK MBTK berada di jalur strategis sebagai alur perdagangan dalam negeri dan internasional.

Sementara itu, dalam Peraturan Presiden No 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutkan secara khusus ada enam kluster dalam rencana pengembangan ekonomi di IKN dan sekitarnya. Salah satunya adalah KEK MBTK di Kutai Timur. Enam kluster itu diproyeksikan menjadi pusat industri dan hilirisasi di sekitar IKN.

Untuk itu, Akmal berharap KEK MBTK bisa tetap berjalan. Sebab, kawasan ini amat potensial untuk industri di Kaltim. Hal ini juga dinilai bisa mengungkit ekonomi di kawasan sekitar Kaltim.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, ia akan berupaya melanjutkan KEK MBTK. Sebab, kawasan industri ini bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang ada di Kaltim, seperti pisang, nanas, cokelat, sawit, dan batu bara. “Kami terus berjuang,” kata Ardiansyah. **(kps)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Status KEK Maloy Terancam Dicabut, Investasi Tidak Berkembang, Diberi Waktu hingga Juni 2024, 06/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (PP 85/2014), Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan memiliki luas 557,34 ha (lima ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP 85/2014, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan terdiri atas:
 - a. Zona industri;
 - b. Zona logistik; dan
 - c. Zona pengolahan ekspor.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.